



Dipercepat, Pembahasan APBD Perubahan 2015

Singaraja (Bali Post) -

Dewan dan pemerintah daerah menyepakati untuk membahas lebih awal APBD Perubahan 2015. Percepatan pembahasan ini karena pemerintah daerah tidak ingin program yang sedang berjalan mandek karena menunggu pembahasan APBD Perubahan. Alasan lainnya, karena Buleleng sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali September 2015 mendatang dipastikan akan menyita waktu banyak. Atas kondisi ini, dewan dan eksekutif menargetkan APBD Perubahan selesai dibahas pada Agustus 2015 mendatang.

Hal itu terungkap ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng di ruang kerja pimpinan dewan, Rabu (24/6) kemarin. Rapat dipimpin Ketua Dewan I Gede Supriatna. Sementara eksekutif dipimpin Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng Gede Dharmaja, M.Si.

Dalam rapat tersebut terungkap, pembahasan APBD Perubahan 2015 ini rancangannya sudah dipersiapkan dan segera mulai dibahas bersama DPRD Buleleng. Pembahasan mulai awal Juli dan ditargetkan APBD Perubahan sudah ditetapkan pada Agustus 2015 mendatang. APBD Perubahan itu sebenarnya hanya menambahkan pos penganggaran di seluruh SKPD yang mengacu pada program yang sudah dijalankan pada APBD induk.

Sekkab Buleleng, Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., usai rapat mengatakan, alasan mempercepat pembahasan APBD Perubahan ini sudah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk membahas dokumen keuangan ini dengan lebih awal. Hal ini untuk menghindari tersendatnya pelaksanaan program maupun kegiatan yang sudah disusun. Selain itu, dalam beberapa

bulan ke depan ini, sejumlah agenda dipastikan akan menyita banyak waktu. Salah satu kegiatan itu adalah ditunjuknya Buleleng sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov Bali yang dihelat September 2015 mendatang. Tidak ingin kedodoran dalam membahas dokumen keuangan itu, pemerintah mengajukan pembahasan APBD Perubahan lebih awal, sehingga pelaksanaan program yang sudah disusun melalui APBD induk bisa terus berjalan dan beberapa kegiatan seperti Porprov Bali itu bisa digelar dengan lancar. "Tadi sudah kita sepakati untuk bulan depan APBD mulai dibahas. Karena ini penambahan atau biasa kita sebut suplemen, sehingga pembahasannya akan bisa kelar Agustus mendatang dan ini juga sekaligus untuk mempercepat pelaksanaan program yang sudah disusun dalam APBD induk," katanya.

Puspaka menambahkan, dalam APBD Perubahan nanti akan dilakukan penyempurnaan pos anggaran. Penyempurnaan ini karena Buleleng menerima kucuran dana yang bersumber dari APBN cukup besar. Dia mencontohkan, alokasi dana desa, pemerintah pusat menambah anggarannya dari awalnya Rp 16 miliar kini ditambah sebesar Rp 20,6 miliar. Masuknya tambahan kucuran dana desa dari pemerintah pusat ini, Buleleng akan mengelola total dana desa

yang akan didistribusikan ke 129 desa lebih dari Rp 36 miliar. "Dana desa ini akan kita distribusikan sesuai proporsi yang sudah disusun. Desa-desa pun mulai mengemas penganggarannya dalam dokumen APBDes." tegasnya

APBDes," tegasnya. Bukan hanya itu, menginjak pertengahan tahun ini, Buleleng akan menerima kucuran dana yang juga dari pemerintah pusat melalui pos dana alokasi khusus (DAK). Tambahan DAK yang khusus untuk bidang pertanian ini mencapai Rp 13 miliar. Tambahan dana ini menyukseskan program nasional yang digagas Presiden Joko Widodo yang mencanangkan swasembada pangan. Sesuai petunjuk teknis, DAK ini programnya sudah jelas dan diatur oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankan program yang sudah diarahkan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna, mengatakan, pada prinsipnya dewan sangat setuju untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan tahun 2015. Dia mengatakan, percepatan pembahasan ini tujuannya agar program yang kini sdang berjalan tidak akan mandek karena menunggu pembahasan APBD Perubahan. "Kami sangat setuju dan komitmen bagaimana APBD Perubahan ini bisa kelar dalam dua bulan ke depan ini," katanya. (kmb38)

Edisi

: Kamis, 25 Juni 2015

Hal

: 13





Dugaan Penyelewengan PHR Badung Giliran Karo Hukum Pemprov Bali Dimintai Keterangan

Denpasar (Bali Post)

Denpasar (Bali Post) Dua hari ini, sejumlah pejabat utama Pemprov
Bali dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Setelah Sekdaprov Bali
Cokorda Pemayun, Rabu (24/6) kemarin penyidik
memanggil saksi dari Biro Hukum Pemprov Bali.
"Hari ini (kemarin - red) yang dimintai keterangan adalah Karo Hukum Pemprov Bali Ida Bagus
Ngurah Arda," sebut Kasipenkum Humas Kejati
Bali Ashari Kurniawan. Bali Ashari Kurniawan.

Dia diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan pembagian pajak hotel dan (PHR) untuk enam kabupaten di Bali. Penyidik yang memeriksa adalah Made Tangkas dan Ketut Yasa. Dalam perkara ini, hingga Rabu kemaru sudah ada 20 saksi yang diperiksa panyidik. Hang sudah ada 20 saksi yang diperiksa penyidik. Hanya, belum ada yang mengarah atau terindikasi tersangka dalam kasus yang terbongkar berkat laporan anggota DPRD Badung itu.

Sementara terkait pemeriksaan Sekdaprov Bali Cok Pemayun, jaksa Made Tangkas mengatakan, pemeriksaan dilakukan soal LPJ dan PHR tahun 2014. Mengapa pemeriksaan lama? "Ya, karena datanya banyak," katanya.

Sebelum Cok Pemayun, untuk mengungkap perkara ini memang sejumlah pejabat baik di daerah sebagai penerima maupun di Provinsi Bali, sudah dimintai keterangan. Namun hingga saat ini belum ada kenaikan status atas penyelidikan kasus yang awalnya dilaporkan anggota DPRD Kabupaten Badung Nyoman Sentana itu

Pejabat yang sudah diperiksa, selain Kadispenda Badung Adi Arnawa, tim penyidik perkara dugaan penyimpangan PHR juga sudah memer-iksa mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana, yang saat ini Sekwan DPRD Bali. Pejabat lainnya, Kadispenda Kota Denpasar Dewa Semadi, Kasubag Keuangan Bangli I Ketut Nurjana, S.E. dan Kasubag Keuangan Tabanan Wayan Arimbawa. Ada juga pejabat dari Klungkung dan sejumlah pejabat lainnya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal





Garap Area Publik



Nyoman Suwirta

PEMKAB Klungkung kini mulai serius untuk merancang area publik. Halini ditandai dengan adanya rencana dari Pemkab untuk membangun taman kota dan rest area. Bahkan untuk mewujudkan hal itu, perencanaannya akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2015. "Pemkab rencananya membangun taman kota di sebelah selatan Pemedal Agung yang berada satu lingkungan dengan objek wisata Kerta Gosa. Taman kota tersebut akan dibangun di atas tanah Pemkab yang saat ini masih berdiri tiga unit rumah dinas," ujar Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Namun, kata dia penataan di sekitar Pemedal Agung akan dikoordi-

nasikan dengan pihak Puri Klungkung. Selain taman kota, Pemkab Klungkung juga berencana akan membangun rest area atau tempat istirahat di sepanjang pesisir pantai Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan. Dalam penataan di lokasi ini, bupati meminta agar dilakukan secara sederhana dan tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar. Bahkan bupati juga berharap dalam melakukan penataan tersebut, tidak sampai menggusur pemukinam warga. "Kita tata satu kesatuan dengan warga di sana, tidak banyak ada perubahan. Yang jelas, kami akan berdayakan masyarakat," jelasnya. Selain dua hal di atas, Bupati Suwirta juga mengatakan akan menata atau membangun pelabuhan rakyat di Desa Pesinggahan, Dawan. Perencanaan tersebut juga akan dilengkapi dengan adanya pasar desa termasuk pasar ikan. (kmb)

Edisi :

: Kamis, 25 juni 2015

Hal

: 12





Jelang Akhir Triwulan Kedua Dispenda Bali Masih Kejar 4 Persen Pendapatan

Denpasar (Bali Post)

Dinas Pendapatan Bali pada triwula n kedua ini memasang target pemasukan 45 persen dari total pendapatan daerah. Namun menjelang berakhirnya triwulan kedua yang tinggal beberapa hari ini, Dispenda Bali justru masih harus mengejar empat persen pendapatan lagi. "Kita memang mengalami sedikit kendala di Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terutama di BBNKB bagi kendaraan yang baru. Sebab, data yang kita peroleh baik dari Gabungan Industri Mobil Indonesia (Gaikindo) maupun dari Astra memang terjadi penurunan," ujar Kepala Dinas Pendapatan Bali I Made Santha, Rabu (24/6) kemarin.

Menurutnya, penurunan penjualan mobil dan sepeda motor ini sangat memengaruhi pendapatan daerah dari BBNKB. Tak pelak, target pendapatan pada triwulan kedua ini terancam tidak tercapai. Meskipun, pendapatan dari pajak lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan bisa terpenuhi. "Yang masih kita kritis di BBNKB saja. Sesungguhnya sudah dari 1,5 bulan kita melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini. Yang pertama, kita melakukan razia door to door kepada wajib pajak supaya dia segera menyelesaikan urusan BBNKB 2 (balik nama bagi kendaraan second red)," papar Santha.

BBNKB 2 (balik nama bagi kendaraan second-red)," papar Santha.

Selain itu, pihaknya juga melakukan razia gabungan di UPT Samsat masing-masing kabupaten/kota. Begitu juga melalui Dinas Perhubungan, sudah membuka ruang peremajaan bagi kendaraan sewa serta bekerja sama dengan para dealer untuk memenuhi BBNKB 1 (balik nama bagi kendaraan baru - red). "Harapan kita, tentunya akan memberikan solusi terhadap titik kritis kita yang kurang lebih lagi 4 persen itu. Sekarang kan masih ada sisa waktu 6 hari ke depan, kita lihat lagi, mudah-mudahan tidak ada kendala," harap Santha.

ada kendala," harap Santha.

Dikatakannya, target PAD Bali tahun ini
Rp 3 triliun. PKB dan BBNKB diharapkan menyumbang sekitar Rp 2,2 triliun. Dari jumlah itu,
kontribusi dari BBNKB saja diharapkan Rp 1,2
triliun. (kmb32)

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 3





Kasus CPNS Candra Dewi Diperiksa sebagai Saksi Jagrem

Tabanan (Bali Post) -

Tim penyidik kejaksaan negeri (Kejari) Tabanan terus melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan yang menyeret dua nama petinggi di dinas tersebut yakni I Gede Jagrem, mantan Kabid Angkutan dan Candra Dewi, Kasubag Hukum dan Kepegawaian.

Setelah menetapkan keduanya menjadi tersangka dan melakukan upaya penahanan, tim penyidik Kejaksaan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan. Jika sebelumnya, penyidik memeriksa masing-masing dua orang saksi yang meringankan para tersangka, Rabu (24/6) kemarin, giliran Candra Dewi diperiksa sebagai saksi kasus perkara terhadap tersangka I Gede Jagrem.

Candra Dewi dijemput dari LP Tabanan untuk diperiksa sebagai saksi kasus perkara Jagrem pukul 09.00 wita. Tiba di Kejari Tabanan, Candra Dewi kemudian dibawa ke salah satu ruangan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh jaksa Eka Pariarsini, S.H.

Setidaknya selama empat jam mulai pukul 09.00

wita hingga pukul 13.00 wita, Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Tabanan ini dicecar 41 pertanyaan. "Untuk materi tidak bisa kami sampaikan. Yang pasti yang bersangkutan memang kembali diperiksa sebagai saksi kasus perkara Jagrem," ujar Kasi Pidsus Kejari Tabanan Fathur Rochman.

Ditanya apakah selama pemeriksaan Candra Dewi ditemani oleh tim kuasa hukumnya, pejabat asal Bojonegoro ini mengatakan jika memang tim kuasa hukum tersangka sempat datang, namun tidak untuk mendampingi sebagai pengacara. "Karena posisinya diperiksa sebagai saksi, maka tidak perlu didampingi oleh pengacara," jelasnya.

Selama pemeriksaan, Candra Dewi dinilai bersikap kooperatif. Usai pemeriksaan, rencananya, Kamis (25/6) hari ini tim penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka I Gede Jagrem sebagai saksi kasus perkara Candra Dewi.

Sementara disinggung tentang permohonan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka yang sampai saat ini belum ada kepastian, Fathur Rochman juga belum memberi jawaban pasti. (kmb28)

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 16





PDAM Kota Denpasar Defisit Suplai

Denpasar (Bali Post) -

Kebutuhan air bersih makin meningkat. Namun, cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar baru mencapai 46,54 persen. Artinya, masih banyak warga Denpasar yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Sampai April 2015, PDAM memerlukan pasokan air 1.652 liter per detik, sedangkan kapasitasnya baru mencapai 1.260 liter per detik. Ini menunjukkan kondisi dalam kategori defisit suplai.

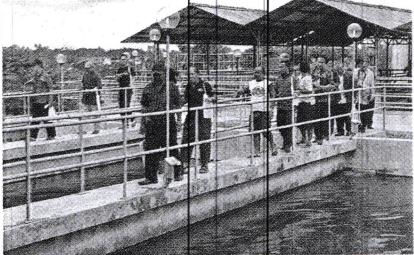
Direktur Utama PDAM Kota Denpasar I Putu Gede Mahaputra mengaku telah melakukan berbagai upaya. "Memang ada defisit, yakni antara suplai dan demand ada selisih 200 liter/detik, sehingga dampaknya Denpasar Barat dan Denpasar Utara masih belum bisa kita atasi," ujarnya di sela-sela temu pelanggan, Rabu (24/6) kemarin, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blusung, Peguyangan. Mengenai cakupan pelayanan yang baru 46 persen, ditegaskan Mahaputra, disebabkan karena masalah sumber air yang terbatas. "Akses air minum kita sebenarnya sudah di atas rata-rata nasional 25 persen. Meski demikian, kita tengah berupaya menuju ke arah perbaikan," jelasnya.

minum kita sebenarnya sudah di atas rata-rata rasional 25 persen. Meski demikian, kita tengah berupaya menuju ke arah perbaikan," jelasnya.

Proyek yang segera digarap yaitu pemasangan pipa Waribang - Jl. WR Supratman, dengan harapan air dari Tukad Petanu masuk ke tengah kota. "Setelah tu, dari Blusung ini akan fokus semuanya tergiring ke barat dan utara," jelasnya.

Proyek perbaikan selanjutnya,

Proyek perbaikan selanjutnya, kata Mahaputra, akan digarap suplai air dari Tukad Penet. "Hanya, untuk Tukad Penet ini baru akan terlaksana tahun 2016 mendatang. Sebenarnya, kita sudah siap, tetapi provinsi yang belum siap pasang pipa setelah ada putus kontrak itu. Artinya, tahun 2016 air dari Tukad Penet baru masuk ke Denpasar Barat dan Denpasar Utara," jelasnya. (kmb12)



Bali Post/ara

PDAM - Temu pelanggan yang dilaksanakan PDAM Kota Denpasar, Rabu (24/6) kemarin di IPA Blusung, Peguyangan. Para pelanggan diajak melihat pengolahan air minum di tempat ini.

Edisi :

: Kamis, 25 Juni 2015

Hal

: 2





Pembangunan Restoran di Jatiluwih Distop

Tabanan (Bali Post) -Satpol PP Kabupaten Tabanan akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menyetop pembangunan salah satu restoran di Jatiluwih. Langkah ini ditempuh karena pemilik mengabaikan penertiban dan pembinaan yang telah tiga kali dilakukan.

"Kami kecewa dengan kepada investor yang mengabaikan peringatan satpol Kami akhirnya memutuskan menyetop pembangunan restoran tersebut," ujar Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba, Rabu (24/6) kemarin. Ia mengatakan rencananya, Kamis (25/6) ini, pemilik dan kontraktor dipanggil.

Ia pun sangat menyayangkan sikap pemilik dan kontraktor yang secara diam-diam tetap melanjutkan pembangunan restoran yang belum mengantongi izin tersebut. "Pemilik sebelumnya telah dipanggil usai disidak juga telah menandatangani BAP atau surat pernyataan untuk bersedia menghentikan kegiatan tersebut,'

ujarnya. Namun, setelah membuat surat pernyataan dan tanda tangan, justru mereka sembunyi-sembunyi malah kerja lagi. "Terpaksa kami tutup," tegasnya. Mantan Kabag Humas

Pemkab Tabanan ini menjelaskan dengan telah ditetapkannya Jatiluwih menjadi Warisan Budaya Dunia (WBD) memang ada larangan untuk tidak sembarangan membangun di kawasan tersebut. Hal ini nantinya ditindaklanjuti dengan aturan tata ruang oleh Bappeda. Untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan selama zo-nasi tersebut belum selesai, Pemkab Tabanan dalam hal ini Bupati Tabanan telah mengeluarkan surat edaran

untuk status quo pembangunan di wilayah tersebut.

"Atas dasar inilah kami tegas melakukan pengawasan. Pasalnya kawasan ini menjadi sorotan tidak hanya dari provinsi melainkan juga dari pusat. Jika ada yang melanggar tentu akan kami tindak tegas, ujarnya.

Bahkan untuk membuat efek jera karena telah mengindahkan peringatan dan pembinaan yang telah diberikan oleh Satpol PP, Sarba menegaskan dirinya tidak segan memberikan SP 1 kepada pemilik bangunan tersebut. "Akan kami berikan surat peringatan pertama, jadi belum sampai tahap pembongkaran," tegasnya. (kmb28)

Edisi

: Kamis, 25 Juni 2015

Hal





Puri Cempaka dan 59 Asetnya Dirampas



DIRAMPAS - Puri Cempaka milik Wayan Candra yang berlokasi di ujung Jalan IB Mantra. Rumah mewah itu kini dirampas untuk negara sesuai putusan Pengadilan Tipikor, Rabu (24/6) kemarin.

Edisi

: Famis, 25 Juni 2015

Hal

1







Denpasar (Bali Post) -

Wayan Candra, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gunaksa, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi, Rabu (24/6) kemarin divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi. Selain itu, Candra harus membayar ganti rugi Rp 1,19 miliar serta 60 asetnya termasuk Puri Cempaka dirampas untuk negara.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Hasoloan yang didampingi dua hakim anggota Sumali dan Hartono menyatakan terdakwa yang mantan Bupati Klungkung dua periode ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni pidana korupsi secara bersama-sama,

tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang secara berlanjut. "Oleh karenanya, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsider enam bulan kurungan," tegasnya.

Putusan hakim tersebut lebih rendah tiga tahun dari tuntutan JPU Made Pasek dkk. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut supaya terdakwa dihukum 15 tahun penjara. Selain hukuman fisik, juga menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti Rp 42.628.467.605,33. Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa. Hakim hanya menjatuhkan pidana tambahan dengan menghukum supaya terdakwa membayar uang pengganti Rp 1.197.000.000.

Hal. 23 Untuk Dilelang



DIKAWAL - Wayan Candra dikawal aparat usai menjalani sidang, Rabu (24/6) kemarin.

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : _1







BALIDARI UDARA 1 Vila "Pagari" Pantai

ABRASI makin mengancam Bali. Hal ini berdasarkan pantauan dari udara yang dilakukan Bali Post, Rabu (24/6) kemarin. Pengamatan dilakukan di sepanjang garis pantai mulai dari Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Karangasem. Di sepanjang pantai Gianyar, abrasi tampak sangat parah khususnya ke arah timur dari Pantai Padanggalak, Sanur. Bangunan-bangunan seperti vila dan pura kini makin terancam gerusan gelombang. Tembok-tembok pembatas yang dibangun sudah mulai diterjang air laut. Bahkan, lahan persawahan yang dulunya jauh dari bibir pantai kini tergerus akibat abrasi. Tampak dalam gambar, puluhan vila berada di bibir pantai di pesisir Gianyar. (kmb33)

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 1